

Analisis Perbedaan Sikap Cina Terhadap Etnis Muslim Hui dan Uyghur

Chrisahyanti Sofi Yustisia– 070912025

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Cina terlibat dalam satu proyek multikulturalisme dengan memberikan pengakuan terhadap keberadaan etnis minoritas. Perubahan ini diawali sejak kepemimpinan Deng Xiao Ping yang melihat bahwa rezim Mao Ze Dong hanya memberi hubungan yang konfliktual dan tidak menguntungkan Cina baik secara domestik maupun internasional. Keuntungan yang diperoleh Cina dengan adanya proyek multikulturalisme ini selaras dengan visi masa depan Cina yaitu maju dalam ekonomi dan masyarakat yang sejahtera. Proyek multikulturalisme Cina merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam kerangka strategi tersebut, terdapat perbedaan sikap Cina terhadap dua etnis Muslim terbesarnya, yaitu etnis Hui dan Uyghur. Pemerintah Cina memajukan etnis Hui dan melakukan promosi akan keselarasan nilai Konfusian dan Islam; sementara terhadap Uyghur pemerintah Cina melakukan tindakan yang represif. Pilihan rasional dapat menjadi salah satu kausal adanya perbedaan sikap tersebut yang dipengaruhi oleh aspek etnisitas dan pengaruh diluar negara yang menyebabkan adanya dilema Cina akan identitas dan kepentingan.

Kata Kunci: *Perbedaan sikap Cina, Islam, etnis Hui, etnis Uyghur, teori pilihan rasional*

China had been involving in multiculturalism project through giving recognition of minorities ethnic existance. This change had been started from Deng Xiao Ping era which seeing the conflitual relationship between state and society at Mao Ze Dong era that brought unbeneficial impact for China itself. Multiculturalism project were part of China's strategy to attain its national interest which brought positive impact that aligned with China's vision to bring prosperity for its citizens and raise the economy. Related to that project there were an indecent action between two biggest Muslim ethnic, Uyghur and Hui. Hui were promoted to be seen as a collaborative partner with China government. Uyghur were opressed and having limited space. Rationality could be one of a reason which underline China government action to both ethnic which is influenced by internal and external factors.

Key words: *China indecent action, Islam, Hui, Uyghur, rationality.*

Setelah tahun 1990, pemerintah Cina tidak lagi di dominasi oleh nasionalisme anti-imperialisme yang pernah di populerkan oleh Mao Ze Dong. Sejarah yang tertulis menunjukkan bahwa perspektif tersebut lebih banyak membawa konflik antar kelas, agresi, penjarahan dan penghinaan nasional (Friedman 1994,69). Belajar dari sejarah di masa lalu, pertumbuhan ekonomi Cina dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Cina “bersahabat” dengan imperialisme itu sendiri. Salah satu contohnya adalah memodernisasi modal asing untuk meningkatkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pula kesejahteraan rakyat Cina.

Pemimpin pasca Mao Ze Dong yaitu Deng Xiao Ping memiliki pemikiran pragmatis dalam memerintah. Melihat kegagalan praksis anti-imperialisme yang disebarkan Mao, Deng Xiao Ping berusaha untuk membangun kembali narasi citra negara yang menggambarkan masa depan Cina dan rakyatnya yang sejahtera yang didasari oleh kejayaan masa lalu yang pernah di raih (Friedman 1994,69). Cina tidak ingin lagi dilihat sebagai Cina yang dahulu, sebagai negara yang mengisolasi diri dan tidak terbuka akan perubahan di level internasional; negara yang memiliki masyarakat yang seragam dengan etnis yang homogen. Namun hal tersebut ternyata berbeda dengan sejarah yang sebenarnya terjadi bahwa sivilisasi Cina terdiri dari banyak etnis yang tersebar. Berkaitan dengan itu, proses sivilisasi yang pernah dilakukan dengan upaya politik asimilasi mulai berubah dengan mengusung nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme yang di sesuaikan dengan situasi riil di Cina.

Reformasi pemerintahan yang diawali oleh kepemimpinan Deng Xiao Ping menunjukkan adanya usaha rekonstruksi citra Cina sebagai negara yang tidak lagi mengedepankan politik asimilasi. Pengaruh monolitisme Lenin membuat pemerintah Cina dimasa Jiang Ze Min dan Mao Ze Dong melakukan proses sinicization (pencinaan) melalui perkawinan (Chen 1991,4). Sekarang ini, melalui museum dan tempat-tempat bersejarah lainnya, pemerintah Cina mencoba bercerita bahwa Cina tidak hanya dimiliki oleh etnis mayoritas, tetapi juga etnis minoritas yang tinggal di dalamnya. Cina memiliki 56 etnis minoritas yang keberadaannya berbeda secara budaya, adat, kebiasaan, agama dan wilayah mereka tinggal. Ada satu resiko atau tantangan dengan potensi masyarakat yang beragam ini. Banyaknya etnis yang diakui tersebut menjadi tantangan bagi nasionalisme penduduk Cina (Young 1993).

Buku Putih Cina tahun 2011 menyebutkan adanya China Peaceful Development yang mengindikasikan bahwa Cina menginginkan pembangunan yang ada di Cina diiringi dengan penciptaan masyarakat yang harmonis. Dibalik pengeluaran buku putih Cina yang mendukung hak-hak rakyatnya untuk mengembangkan identitas etnis yang

dimilikinya, pemerintah Cina memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dua etnis Muslim terbesarnya, etnis Hui dan Uyghur. Tindakan represif diberikan pada etnis Muslim Uyghur di wilayah otonominya, Xinjiang. Sementara etnis Muslim Hui yang memiliki wilayah otonomi Ningxia, dikenal masyarakat sebagai provinsi Muslim Cina. Kontribusi etnis Hui di Ningxia adalah citra positif akan hubungan Islam dan nilai-nilai Sosialis-Konfusianisme Cina.

Selaras dengan apa yang tertuang dalam Buku Putih Cina tahun 2011 dan Konstitusi Republik Rakyat Cina tahun 1982, pemberian ruang gerak bagi etnis minoritas Cina tentu merupakan pilihan rasional yang diambil oleh pemerintah. Bila menarik kembali sejarah Cina, kepemimpinan Mao Ze Dong sangatlah bertolak belakang dengan prinsip-prinsip humanis yang sekarang mulai ditanamkan di Cina. Politik asimilasi untuk menyeragamkan rakyat dengan alasan unifikasi entitas dan wilayah sekaligus memberi identitas nasional Cina di masa lampau dipilih pemerintah dianggap kurang relevan jika diimplementasikan di era dimana demokrasi dan penghargaan terhadap HAM sangat penting. Pemerintah Cina yang didasari oleh kepentingan dan faktor-faktor diluar negara mempengaruhi suatu negara tersebut memilih untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar multikulturalisme tanpa harus sepenuhnya mengadopsi nilai multikulturalisme yang lahir dari nilai Barat. Implementasi nyata hal tersebut adalah 1) pemberian wilayah otonomi etnis minoritas (autonomy region); 2) kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah; 3) kebijakan ekonomi untuk pengembangan wilayah otonomi. Tujuan dari hal ini adalah meminimalisir keinginan etnis-etnis minoritas tersebut untuk melepaskan diri dari Cina.

Kepentingan dalam Proyek Multikulturalisme Cina

Konsep self and other Alexander Wendt dalam konstruktivisme menyebutkan bahwa identitas nasional dipengaruhi oleh bagaimana cara orang lain melihat sesuatu. Disini Cina yang dahulu dipandang sebagai negara Sosialis-Komunis kerap mendapat citra negatif karena kuatnya nilai-nilai Marxis-Leninis era Mao Ze Dong. Cina memiliki nilai Konfusianisme yang sebenarnya mengakomodasi keberagaman tersebut. Konfusianisme mengenal unsur Ronghe (berbaur) yang menyebutkan perlunya harmoni dalam perbedaan (He,n.d:76). Dengan adanya unsur Ronghe, maka masyarakat bertanggung jawab untuk menghormati satu sama lain. Namun, proyek ini tidak sepenuhnya muncul karena nilai Konfusianisme, tetapi juga disebabkan oleh pemikiran pemimpin Cina dari Deng Xiao Ping yang pragmatis, melihat kondisi riil saat itu mendorong Cina untuk mengakui keberagaman.

Stevan Harell berargumen bahwa kepedulian Cina terhadap etnis minoritas merupakan diskursus yang secara penuh membawa keberagaman masyarakat dibawah kontrol Negara (Harell 1996,36). Ketika Cina memilih untuk memberikan ruang bagi etnis minoritasnya berarti tidak sepenuhnya ada kebebasan bagi etnis tersebut. Negara sebagai otoritas tertinggi tetap memiliki kontrol. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu strategi (non-territorial exit) Cina untuk mempertahankan unifikasi nasionalnya yang diikuti dengan pembentukan kembali citra negara Cina. Bukan berarti strategi ini tidak membawa resiko bagi Cina. Pemberian ruang gerak bagi etnis minoritas dengan latar belakang sejarah hubungan yang buruk dengan pemerintah memungkinkan adanya kontak dengan pihak diluar negara menjadi lebih mudah. Potensi tersebut di minimalkan dengan masih pentingnya kontrol negara yang ketat. Selain sebagai strategi, konsiderasi lain adanya multikulturalisme Cina adalah stabilitas dan pembangunan negara.

Kedua etnis Muslim tersebut memiliki identitas religi yang dapat digunakan pemerintah Cina untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara Islam dunia. Islam menjadi perbincangan internasional pasca 9/11. Kerusakan yang terjadi di Xinjiang tahun 2009 tersebut tentu mendapat kecaman maupun himbauan dari negara-negara lain seperti Turki, Swiss, Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait sikap represif Cina terhadap etnis Muslimnya. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada hubungan Cina dengan negara lain. Beberapa perusahaan Cina melakukan investasi di negara Timur Tengah, salah satunya dibidang transportasi (China Railway Construction Corporation) mono rel yang menghubungkan Mekkah dan Madinah. Di kawasan Afrika, perusahaan nasional Cina, China State Construction Enterprise Corporation (CSEC) diberi kewenangan oleh Presiden Algeria, Abdelaziz Bouteflika, untuk membangun Masjid Agung Algeria (Grand Mosque Algeriers) yang diperkirakan menjadi masjid ketiga terbesar di dunia. Di Pakistan, terdapat lebih dari 400 pekerja Cina menyelesaikan pembangunan pelabuhan. Cina-Pakistan terlibat proyek pembangunan pelabuhan Gwadar yang menjanjikan hubungan komersial kedua negara, hingga wilayah Himalaya dan Laut Persia. Kerjasama Sino-Arab juga terlihat dalam The Chinese-Arab Friendship Association antara Cina dengan 22 negara Arab, untuk mencapai mutual understanding terkait politik dan ekonomi; aktif berunding di Gulf Cooperation Council untuk pakta perdagangan bebas. Kerjasama energi dengan Turkmenistan.

Cina memiliki kepentingan dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim tersebut dan juga berkepentingan untuk mempertahankan legitimasi dalam negerinya. Cina tidak ingin kebijakan yang memfasilitasi keberagaman tersebut menjadi bumerang yang

merugikan. Kebijakan tersebut merupakan tools Cina untuk memperlihatkan bahwa Cina memiliki hubungan baik dengan Islam sekaligus menjadi dalih tindakan represifnya terhadap Uyghur.

Dru Gladney dalam artikelnya *Representing Nationality in China: Refiguring Majority/Minority Identities* menyebutkan multikulturalisme ini memiliki tujuan yang di drive oleh kepentingan pemerintah Cina (Gladney 1994,23). Beth Noar menyebutkan bahwa ini merupakan bentuk manipulasi pemerintah pusat terhadap institusi budaya dan keberadaan etnis untuk meningkatkan otoritas pemerintah pada etnis minoritas (Noar 2006).

Secara normatif ketika suatu negara mengusung multikulturalisme maka sikap negara terhadap satu etnis dengan etnis lain adalah sama. Realita di Cina menunjukkan bahwa pemerintah melakukan tindakan represif dan pelarangan ibadah serta pembatasan lainnya bagi etnis Uyghur dan bertindak sebaliknya terhadap etnis Hui. Pemerintah memperkenalkan Ningxia-Hui atau etnis Hui kepada masyarakat internasional sebagai simbol keberhasilan pemerintah Cina dalam proyek multikulturalisme yang dijalankan. Hubungan harmonis antara Hui dan pemerintah Cina di promosikan untuk menarik simpati negara-negara mayoritas penduduknya Islam untuk mau bekerjasama dengan Cina.

Analisis Perbedaan Sikap Pemerintah Cina

Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan sikap pemerintah Cina antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain adalah proses nation building yang pernah diterapkan Cina di masa lampau mempengaruhi hubungan Cina dengan kedua etnis yang di anggap sebagai kepentingan Cina; identitas diluar identitas nasional mereka sebagai Cina (baik etno-religi maupun bahasa) yang mendasari sikap kedua etnis tersebut. Sementara faktor eksternal meliputi dukungan negara Islam terhadap kedua etnis dan adanya ethnic kin yang tinggal diluar Cina.

Kepentingan disini dapat dianggap sebagai faktor internal karena datang dan di rumuskan didalam suatu negara, namun tetap mendapat pengaruh eksternal seperti hubungan Cina dengan identitas religi etnis Hui dan Uyghur, yaitu Islam. Dilihat dari inherent etnis itu sendiri, tiap individu tidak hanya memiliki satu identitas yang ada dalam dirinya. Hui dan Uyghur terafiliasi sebagai etnis Muslim karena agama mereka Islam hasil dari perkawinan campur ketika Jalur Sutra dan penggunaan bahasa. Etnisitas kedua dapat dilihat dari nasionalisme keduanya juga politisasi negara untuk menggolongkan keduanya sebagai bagian warga negara Cina. Bentuk politisasi yang pernah dilakukan tersebut yang berdampak bagi cara interaksi etnis tersebut.

Keberadaan etnis Hui membawa dampak positif bagi Cina, Ningxia mendapat donasi jutaan dolar AS dari Arab melalui Islamic Development Bank untuk sekolah tinggi Islam di Ningxia. Hui merepresentasikan Muslimness dan Chineseness yang berjalan selaras (Gladney 2007,9). Pemerintah Malaysia banyak membantu sektor pendidikan dan institusi Islam yang ada di Ningxia baik dalam bentuk dana maupun tenaga pengajar bagi sekolah Islam. Industri makanan halal kecil menengah di Ningxia memiliki omset pertahun 700 miliar dolar AS di ekspor ke Asia Tengah dan sekitarnya. Cina memberi keleluasaan bagi pemerintah lokal Ningxia untuk bekerjasama dengan negara-negara Arab.

Lain halnya dengan Uyghur yang memiliki organisasi pembebasan yang dapat mengancam keamanan wilayah Cina, antara lain Eastern Turkestan People's Party (ETPP), East Turkestan Liberation Organization dan East Turkestan Islamic Movement (ETIM) (Wardhani 2011, 41). Uyghur juga memiliki Islamic Party of Turkestan yang merupakan organisasi ilegal didalam Cina (Israeli,2010). Dari aspek ethnic kin (ikatan etnis) dengan Uyghur di luar Cina, mereka bersatu di Amerika dan Eropa dan membentuk organisasi internasional untuk memperjuangkan hak-hak Uyghur dikatakan di represi oleh pemerintah Cina; melalui media maya, media serta kongres (Chen 2010,5). Uyghur memiliki Uyghur American Asssocation yang bermarkas di Washington D.C serta World Uyghur Congress yang merupakan forum etnis Uyghur diluar Cina untuk membahas masa depan Uyghur dan Xinjiang.

Perbedaan kontras tersebut coba ditelaah oleh penulis melalui perbandingan karakteristik etnis Hui dan Uyghur dengan etnis mayoritas yang ada di Cina, yaitu etnis Han. Perbandingan ini berupaya untuk melihat kedekatan ketiga etnis tersebut dengan identitas Cina yang di representasikan melalui etnis Han.

Tabel 1.1 Perbandingan Etnis Han, Hui dan Uyghur

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa	Etnis Han	Etnis Hui	E t n i s Uyghur
Etnisitas	Han	Hui	Uyghur
Identitas Nasional	<i>Chinese</i>	<i>C h i n e s e Muslim</i>	<i>C h i n e s e Muslim</i>
Identitas Politik	<i>Chinese</i>	<i>Chinese</i>	<i>E a s t Turkestan</i>
Identitas Regional	--	Ningxia-Hui AR	Xinjiang-Uyghur AR
Etno-Religi	--	Islam	Islam
Bahasa	Mandarin	Mandarin	Uyghur

Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan antara ketiganya terletak pada identitas politik yang dimiliki oleh etnis Uyghur, juga identitas regionalnya dan penggunaan bahasa. Dimulai dari identitas politik, disini Uyghur memiliki hubungan histori yang kurang baik dengan pemerintah Cina. Uyghur menganggap dirinya bukan bagian dari Cina namun orang East Turkestan yang pernah merdeka secara wilayah maupun pemerintahan dari Cina dengan nama Islamic Eastern Turkestan Republic tahun 1933-1934 dan berganti nama menjadi East Turkestan Republic dengan ibukota di Ghuja, Uni Soviet (Wardhani 2011,59). Masih kuatnya identitas lain pada etnis Uyghur beresiko pada tidak stabilnya kondisi politik dan masyarakat di Xinjiang. Salah satunya masih adanya kelompok yang meminta adanya pemisahan diri dan teritori dari Cina. Berbeda dengan Uyghur, etnis Hui menganggap dirinya sebagai bagian dari Cina. Lipman menyebut Hui 'familiar strangers' karena lebih dari 1,300 tahun keberadaan mereka di Cina, tidak ada tuntutan pembebasan ataupun konflik etnis berkepanjangan yang mengancam stabilitas Cina. Dengan kata lain, Hui lebih terintegrasi dibandingkan etnis Uyghur.

Aspek kedua adalah identitas regional dimana aspek kewilayahan mempengaruhi perilaku entitas didalamnya. Ada dua klasifikasi letak yang berkaitan dengan tingkah laku entitas didalamnya, yaitu frontier dan boundary (Wardhani 2011,17). Xinjiang dianggap sebagai wilayah frontier karena memiliki kecenderungan berpikir keluar (outer oriented) yang disebabkan oleh adanya kelompok sentrifugal yang menuntut pemisahan diri. Secara letak, Ningxia memang berada didalam Cina dan tidak berbatasan langsung seperti Xinjiang dengan negara lain (Warr 1993,57). Karena resiko letak daerah otonomi Xinjiang yang berbatasan langsung dengan negara lain, maka negara sebagai otoritas tertinggi berusaha untuk mempertahankan unifikasi teritorinya. Aspek ketiga adalah penggunaan bahasa. Tingginya identitas politik yang disini merupakan etno-religi Uyghur terlihat dalam penggunaan bahasa Uyghur di Xinjiang. Berbeda dengan Hui yang hanya memiliki satu bahasa pengantar yaitu, Mandarin. Dibawah ini juga merupakan survei yang menunjukkan bahwa secara etnis, Uyghur memiliki sense of belonging yang lebih besar.

Tabel 1.2 Nasionalisme Etnis dan Nasionalisme Warga Negara Oleh Etnis Minoritas di Cina

<i>National dan Ethnic Identity in China</i>		
<i>Feeling Thermometer 0-100</i>		
<i>Ethnicity</i>	<i>Country ID</i>	<i>Ethnic ID</i>
Han	89	80
Hui	90	89
Mongol	90	91
Tibetan	89	91
Kazak	89	95
Uyghur	90	96
<i>Source: 2006-2007 Chinese Ethnicity Survey</i>		
<i>Note: Country ID=How close do you feel to your country?, Ethnic ID= How close do you feel to your ethnic group?</i>		

Sumber: (Tang&He 2010)

Tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa faktor inherent dari dalam etnis tersebut dapat mereaksi sikap pemerintah Cina. Secara konstitusi keberagaman etnis difasilitasi. Namun Cina tidak serta merta mengimpementasikan kebijakan tersebut ketika ada reaksi non-kooperatif dari etnis Uyghur di Xinjiang. Kepentingan Cina adalah meningkatkan posisi pemerintah yang kuat di dalam negeri serta mampu memberi kesan bahwa Cina yang sekarang berbeda dengan Cina yang dahulu. Sehingga kebijakan yang mengakomodasi keberagaman di Cina tersebut di jadikan alat Cina untuk menunjukkan pada negara lain bahwa Cina berbeda dengan rezim Mao, yang di tunjukkan dengan hubungan kooperatif Cina dengan Hui untuk menutupi tindakan represif terhadap Uyghur yang menginginkan adanya pemisahan diri.

Faktor eksternal yang mendorong perbedaan sikap Cina terhadap etnis Hui dan Uyghur tidak lepas dari peran ethnic kin kedua etnis. Bila etnis Hui pada pembahasan sebelumnya disebutkan berhasil menjalin hubungan baik dengan negara Arab melalui perdagangan. Etnis Uyghur memiliki ethnic kin di beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat. Rabiya Kadeer pemimpin Uyghur American Association di Washington D.C aktif menggalang dukungan di Amerika yang salah satu bentuknya adalah lawatan perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Patrick Ventrell, meminta Beijing untuk melakukan investigasi mendalam dan transparan terhadap kerusuhan yang terjadi Juli 2009. Turki yang masih memiliki hubungan sejarah dengan Uyghur juga menunjukkan simpatinya dengan menkritik pemerintah Cina akibat kerusuhan tersebut melalui pernyataan Perdana Menteri Erdogan.

Pemerintah Cina sadar bahwa tindakan represifnya akan mempengaruhi kerjasama internasional yang dijalin. Alasan Cina memilih untuk merepresi Uyghur tidak lepas dari pilihan rasional yang diambilnya untuk mempertahankan kepentingan Cina di dalam negeri dan luar negeri.

Kesimpulan

Proyek multikulturalisme Cina merupakan alat untuk melancarkan pencapaian kepentingan Cina. Cina mencoba mengemas kembali identitas nasionalnya melalui proyek ini dengan mengusung nilai kesatuan dan pluralisme yang ada dalam Konfusianisme. Dilema disini muncul ketika Cina mencoba menseleraskan kemajuan ekonomi, unifikasi, kesejahteraan masyarakat yang beragam dalam konsep *harmonious country*, seolah tidak sesuai dengan adanya tindakan represif yang dilakukannya terhadap Uyghur.

Perbedaan sikap pemerintah Cina terhadap dua etnis Muslim, merupakan tantangan bagi Cina dalam mencitrakan diri sebagai negara yang ramah, terutama dalam keberagaman. Hal tersebut juga membahayakan hubungan Cina dengan negara lain khususnya negara Islam, yang memiliki solidaritas terhadap keseluruhan warga Muslim global di waktu mendatang. Cina membutuhkan mereka untuk kepentingan Cina, baik dalam hubungan bilateral, kerjasama minyak, infrastruktur atau pemasaran produk Cina. Ketika identitas merupakan dasar dari pembangunan kepentingan, maka fakta bahwa Cina melakukan represi terhadap Uyghur menunjukkan inkonsistensi citra Cina sekaligus kemampuan nilai Konfusian yang dominan terhadap identitas Cina.

Etnis Hui menunjukkan bahwa mereka mampu berkolaborasi dengan pemerintah, tidak menunjukkan adanya benturan dalam proyek multikulturalisme tersebut. Hal inilah yang mendorong Beijing untuk lebih memperkenalkan Hui karena secara etnisitas mereka mampu menunjukkan identitas sebagai bagian Cina dan Muslim. Upaya ini juga digunakan untuk mempertahankan hubungan baik Cina dengan negara lain terutama negara-negara Islam.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sejak rezim Deng Xiao Ping hingga sekarang lebih pragmatis dengan pemilihan sikap-sikap yang strategis untuk menyeimbangkan identitas dan kepentingan agar hasilnya yaitu kebijakan dapat merepresentasikan keduanya. Proses tersebut tidak lepas dari rasionalitas. Cina tetap melakukan pembatasan dan pengetatan terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Dimana pengetatan ini disebabkan faktor etnisitas Uyghur dan kepentingan Cina dari Uyghur, bukan dikarenakan faktor identitas Cina yang tidak konsisten.

Disamping tujuan untuk mencapai perekonomian yang maju dengan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, Cina secara domestik juga berkepentingan untuk tetap mempertahankan unifikasi nasional. Unifikasi nasional menjadi salah satu bentuk pertahanan legitimasi Cina secara domestik sekaligus terdapat dalam nilai-nilai Konfusian. Cina menyadari kegagalan proses nation-building Uyghur yang memunculkan permasalahan etnisitas (*minzu wenti*) jika dibiarkan terlalu lama akan menjadi bom waktu bagi Cina itu sendiri. Bagi Cina, ancaman susah untuk diatasi ketika negara tidak mampu mendeteksi sumber ancaman itu sendiri. Organisasi di Washington, D.C, National Endowment melalui konferensi *Can Anyone Hear Us? Voices from the 2009 Unrest in Urumchi* yang dihadiri oleh beberapa akademisi seperti Dru Gladney, Hans Hogrefe juga perwakilan etnis Han, Dr Yang Jianli, menyebutkan bahwa represi yang dilakukan merupakan bagian dari dominasi dan strategi pemerintah Cina.

Dalam hal ini sumber ancaman Cina berasal dari persoalan etnisitas yang meluas karena *ethnic kin* dan solidaritas religi. Ketika kerusuhan muncul, Hu Jintao memilih kembali ketika G-8 Summit di L'Aquilla untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa Cina berusaha untuk konsisten akan proyek multikulturalismenya, namun tuntutan dari Uyghur akan kesetaraan dan pembebasan masih bergulir.. Norma dan nilai yang menjustifikasi bahwa terorisme identik dengan Islam secara tidak langsung mempengaruhi sikap Cina terhadap Uyghur. Cina merefleksikan gerakan seaparatis Uyghur dengan kejadian 9/11 dimana War on Terrorism menjadi fokus internasional.

Mengetahui potensi ancaman bagi keamanan yang dapat menghambat kepentingan Cina, maka Cina memilih untuk memperketat pengawasan terhadap kegiatan keagamaan di Uyghur, termasuk kontrol informasi dengan tetap membatasi informasi Uyghur untuk mencegah meningkatnya kesadaran akan hak-hak sipil atau hubungan lain antara warga negaranya dengan *ethnic kin* Uyghur diluar Cina. Cina tidak ingin masalah Uyghur mempengaruhi hubungan baik Cina dengan negara lain, khususnya negara Islam yang sudah baik. Cina sempat meminta kepada beberapa negara, seperti Jepang dan Australia untuk tidak menerima pimpinan-pimpinan etnis Uyghur, terutama Rabiya Kadeer yang dicurigai sebagai aktor penyebab kerusuhan Urumqi untuk masuk ke Jepang dan Australia. Namun hal tersebut ditolak secara halus oleh Jepang dan Australia. Hal ini menunjukkan bahwa pihak diluar negara masih menjunjung tinggi prinsip netralitas. Alasan sikap represif tersebut adalah untuk mempertahankan unifikasi nasional dengan memberantas pergerakan terorisme di Xinjiang serta kelompok teroris Turkistan Timur.

Selain unifikasi nasional, partisipasi Cina dalam rezim internasional juga mempengaruhi perbedaan sikap represif Uyghur dan memberi keleluasan bagi Hui. Secara regional, Cina bergabung dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang menyediakan forum bagi Cina untuk melatih kepemimpinan Cina dalam organisasi multilateral serta memperluas pengaruhnya secara regional. Pada pertemuan SCO Juni 2010, Hu Jintao mengemukakan janji untuk memberantas terorisme yang berada di Cina dan mendukung hal tersebut untuk negara-negara SCO. Cina menganggap gerakan-gerakan anti-pemerintah berpotensi untuk ditunggangi jaringan terorisme internasional, sehingga pemerintah dianggap perlu untuk membatasi aktifitas mereka.

Dengan label terorisme tersebut, maka Cina sedang berkepentingan untuk melegalkan sikap represifnya terhadap Xinjiang; sekaligus mengaburkan perbedaan dari masing-masing *three evils* (separatisme, ekstremisme dan terorisme) Cina. Keuntungan lain yang didapat Cina selain apresiasi akan pemberantasan terorisme adalah Cina dapat berada di tengah-tengah negara dengan paham liberal yang menjunjung tinggi demokrasi, HAM dan pemberian hak bagi minoritas dan negara-negara yang tidak memerlukan hal tersebut untuk bekerjasama. Cina memiliki Hui sebagai dalih bahwa Cina memiliki nilai-nilai Barat yang dikemas dengan Konfusianisme dan Sosialis dalam proyek multikulturalisme. Sedangkan terhadap negara dunia ketiga, atau bahkan negara Islam yang tidak memerlukan nilai-nilai liberal dalam kerjasama, Cina juga dapat mengurangi barrier tersebut karena persamaan sikap Cina dan beberapa negara Islam dalam menghadapi kelompok anti-pemerintah yang di represi oleh negara.

Ketika Cina aktif melakukan propaganda sebagai upaya untuk menarik simpati karena ancaman terorisme dari Uyghur, Cina menunjukkan fakta lain dengan keberadaan etnis Hui yang sama-sama Muslim dan tinggal di Barat Cina namun mampu sejalan dengan pemerintah Cina. Potensi etnisitas Hui dijadikan strategi oleh Beijing untuk menyeimbangkan pandangan pihak luar baik dari negara Barat maupun solidaritas Muslim global terhadap Cina. Hubungan baik Hui dan Beijing bukan lagi sebagai propaganda Cina, namun fakta untuk ditunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Cina mampu berjalan harmonis dengan Islam. Dilema Cina akan kepentingan dan identitas dapat dijembatani dengan rasionalitas Cina terkait sikapnya terhadap kedua etnis tersebut.

Daftar Pustaka

- Bhattacharya, Abanti. 2003. "Conceptualising Uyghur Separatism in Chinese Nationalism", *Strategic Analysis* 27
- Cannon, Justin M. 2007. "Using Terrorism to Justify Repression: Rabiya Kadeer Visit MIT Community", *The Tech:MIT's newspaper* dalam <http://tech.mit.edu/V127/N26/uyghurs.html> diakses 30 Juli 2013
- Chen, Yu-Wen. 2010. "Who Made Uyghurs Visible in the International Area?" paper *Global Migration and Transnational Politics* No.12
- Chen, Kuiyuan. 1991. "Study Marxist Nationality Theory and Correctly Understand National Issues in the New Period" *Shijian*
- D. Walsh. 2005. "The New China: as uneasy as beijing develop a strategic string of pearls", *The Guardian*, (online), dalam <http://www.guardian.co.uk/business/2005/nov/10/china.internationalnews?INTCMP=SRCH> diakses 12 Juli 2013
- Friedman, Edward. (1994,February) *Reconstructing China's National Identity: A Southern Alternative to Mao-Era Anti Imperialis Nationalism*", *Journal of Asian Studies* 53, 67-91 dalam <http://www.jstor.org/discover/10.2307/2059527?uid=3738224&uid=2134&uid=10743224&uid=2&uid=759776&uid=70&uid=3&uid=20355984&uid=76&uid=4893904&uid=4877216&uid=4877232&uid=60&sid=21102475525301> diakses 19 Juli 2013
- Gladney, Dru C. 1994 "Representing Nationality in China: Refiguring Majority/Minority Identities", *Journal of Asian Studies* 53
- Grundy Warr, Carl. 1993. "Coexistence Borderlands and Intrastae Conflict in Mainlad Southeast Asia," *Singapore Journal of Tropical Geography* Vol. 4
- Harell, Stevan ed. 1995. "Introduction: Civilizing Projects and the Reaction to Them," *Cultural Encounters on China's Ethnic Frontiers*. Seattle: University of Washington Press
- Hayoun, Massoud. 2012. "Islam with Chinese Characteristics", *The Atlantic*, (online) dalam <http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/01/islam-with-chinese-characteristics/251409/> diakses 25 Agustus 2013
- Israeli, Raphael. 2010. "China's Uyghur Problem", *Israel Journal of Foreign Affairs* IV (online)

<http://israelcfr.com/documents/4-7-Raphael-Israeli.pdf> diakses 10 Juni 2013

Kymlicka, Will dan B. He, ed. 2005 *Multiculturalism in Asia*. Oxford:Oxford University Press

LSW Wardhani, Baiq. 2011. *Identitas, Etnik dan Konflik Tantangan di Era Kontemporer Surabaya: Cakra Studi Global Strategis*

Noar, Beth. 2006. *Displacing Desire:Travel and Popular Culture in China Honolulu:University of Hawaii Press*

Permanent Mission of the People's Republic of China, White Paper 1999: *Ethnic Minorities Policy in China*, (online) dalam <http://www.china-un.org/eng/gyzg/xizang/t420274.htm> diakses 27 Mei 2013

Tang, Wenfang dan Gaochao He. 2010. "Separate but Loyal: Ethnicity and Nationalism in China," *Policy Studies* 56, East-West Centre: Institute of Southeast Asian Studies

Yuan, n.d "China's role in establishing and building the Shanghai Cooperation Organization (SCO)", *Journal of Contemporary China* Vol.19 No.67